Globethics Repository



Modernitas dan Media

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Chakim, Sulkhan
Publisher	IAIN Purwokerto
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-09 11:33:03
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/154271

MODERNITAS DAN MEDIA: ISU NASIONALISME

Sulkhan Chakim
Peserta Program Doktor Kajian Media dan Budaya
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

ABSTRACT

This study focuses on the power and influence of mass media in relation to the modernity in Indonesia. Some of the key media theories are related to issues of modernity and nationalism in Indonesia. The description of historical facts always contains an inherent bias with technologies related to the use of media-related time or space. Both are based on the political and economical interest.

Some of the strategies in the discourse and praxis of nationalism in the form of pragmatic interests, consensus can not be realized then what happens is done in a way compromises tolerate arguments and ethical-political beliefs and find a balance. actual mass media as a new technology can strengthen and pasting various elements of the nation that can be imagined through the messages of national language and strengthen nationalism. Both became major elements of discourse in producing the realization of integration and political legitimacy in the context of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI).

Kata kunci: media, modernitas, pragmatis, konsensus, kompromi, nasionalisme.

PENDAHULUAN

Kajian ini akan mendiskusikan tentang beberapa kunci teori media yang berhubungan dengan persoalan modernitas dan Nasionalisme di Indonesia. Modernitas dijadikan tema pokok yang secara signifikan akan memberikan kontribusi secara kontroversial bagi pemahaman kita tentang media pada era modern. Istilah modern secara umum dipahami pada acuan dasar tentang perkembangan-perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang karakteristiknya terjadi pergeseran dari persoalan tradisional kepada kemajuan-kemajuan peradaban (*advanced civilizations*)[1]. Perbedaan karakteristiknya, seperti modern versus tradisional dicirikan dengan munculnya kapitalisme (pasar-pasar) versus subsistence, industrialisasi vs pertanian, urbanisasi vs rural, birokrasi vs aristokrasi, science vs religion, rasional vs emosional, rule of law vs barbarisme, kulture vs nature, literacy vs masyarakat oral, dan individualisme vs komunalisme. Seperangkat karakteristik tersebut, beberapa faktor penting modernitas adalah prinsip-prinsip kapitalis dan institusi[2], berbeda dengan Turner[3], persoalan sekularisasi dan instrumen rasionalitas dijadikan faktor terpenting kaitan dengan modernitas. Persoalan yang tidak dapat dihindari perubahan-perubahan sosial terjadi dari berbagai ketegangan persoalan politik, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya.

Suatu fase modernitas yang spisifik terkait dengan pertumbuhan harian koran, telegrap, telepon, dan media massa yang mengkomunikasikan di berbagai penjuru dunia[4]. Memang dalam konteks tersebut, persoalan modernitas dan paham modern sering dibedakan, Modernisme mendasarkan pada seni eksperimental dan tulisan (*writing of*) atau dipahami sebagai respon konsekuensi sosial modernitas. Oleh karena itu, keduanya

sangat ditopang dengan perkembangan teknologi media massa yang menjadi aspek penting dari modernitas. Namun demikian, dalam perspektif yang berbeda teori media dapat diasumsikan teknologi menjadi kekuasaan dan kekuatan utama yang positif bagi perubahan sosial. Pengembangan kajian ini memfokuskan pada kekuatan media massa dan pengaruh modernitas dalam konteks ke Indonesiaan.

BIAS KOMUNIKASI

Berangkat dari teori media yang digagas oleh Innes[5], ia menggambarkan fakta historis, bahwa bias selalu inheren dengan teknologi-teknologi media yang berhubungan dengan pemanfaatan yang berhubungan waktu atau ruang. Keduanya didasarkan pada kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Kepentingan keduanya dengan adanya upaya pelanggengan kekuasaan ekonomi dan politis yang terpusat pada otoritas birokratis, walaupun kekuasaan juga dapat dibangun oleh agen-agen eksternal. Secara faktual, bias yang terjadi dalam konstelasi aturan atau perundang-undangan yang berlaku yang mengkombinasikan antara kekuasaan sentral dan desentral. Menurut Innis[6], berbagai institusi baik berupa institusi pemerintah maupun institusi bisnis besar mengkombinasikan keduanya untuk kepentingannya dan melindungi kekuasaannya.

Berangkat dari perspektif Innis di atas, bias media digunakan untuk mengembangkan berbagai issue bagaimana pengetahuan dan informasi disebarkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pesan media berupa pengetahuan dan informasi yang lebih berpengaruh adalah bukan pada isi/*content* keduanya. Seperti halnya, teknologi-teknologi media bersifat diterminan terhadap persoalan manusia, yang berusaha menyebarkan teknologi-teknologi baru dapat menciptakan cara-cara baru dalam kehidupan masyarakat; berupa kemajuan suatu media baru akan memunculkan suatu peradaban baru[7], misal penggunaan internet yang awal perkembangannya sebatas di warnet, tetapi dewasa ini setiap orang tidak mengenal ruang dan waktu dapat mengaksesnya tentang berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. Khususnya berbagai informasi dan proses komunikasipun sangat cepat dan mudah menembus segala lini kehidupan umat manusia. Oleh karen itu, kemajuan teknologi akan menghasilkan dan merubah peradaban yang baru. Sebagai contoh persoalan modernsasi di Cina pada tahun 1949[8], yang mana gerakan modernisasi dianggap oleh mahasiswa dan warga masyarakat menjadi sesuatu yang kontradiksi, yaitu modernisasi sebatas “attituts” dan”gagasan-gagasan”, artinya modernisasi tidak bermakna secara material bagi kemajuan Cina, yang mana pertentangan berlanjut pada penguasaan media massa atas fasisme di satu pihak dan kapitalisme di pihak lain.

Teori media Innis di atas, mendapat dukungan, yaitu *pertama*, Walter J.Ong merujuk pada budaya-budaya yang muncul di dalam teknologi cetak yang mengembangkan perbedaan berbagai pengalaman sensori daripada persoalan tradisional, dan budaya oral. Perbedaan yang mendasar adalah kemampuan membaca dan menulis informasi akan mereduksi kemampuan memori individu. *Kedua*, didukung oleh Benedict Anderson, bahwa teknologi cetak dan ekonomi kapitalis memberi peluang menciptakan bentuk baru berupa masyarakat yang dibayangkan (*imagined communities*)[9]. Oleh karena komunitas lokal sebagai penyatu melalui gagasan sebuah bahasa masyarakat dan identitas nasional. Sementara gagasan teknologi media berpengaruh pada perubahan-perubahan di

bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan agama yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat luas.

Era modern banyak cenderung mengistimewakan individualisasi, permintaan media massa menjadi pentingnya politik penawaran yang terkait dengan sejarah kebudayaan (era demokratisasi). Oleh karenanya, yang harus diperluas adalah tawaran kultural, dan tidak sebatas permintaan-permintaan belaka, solusinya penguasaan akses dunia masyarakat; dan seluruh gerakan emansipasi politik budaya; memperluas kapasitas pemahaman dunia melalui tawaran-tawaran seluas mungkin[10].

Sebagai ilustrasi gagasan tersebut, Indonesia memiliki bahasa dan identitas nasional sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa, atau dengan kata lain apapun etnis dan agamanya berkewajiban memelihara dan mempertahankan NKRI. Dengan demikian kajian ini diperlukan pada relasi kuasa yang terkait dengan bagaimana gagasan identitas nasionalisme dapat dibayangkan melalui medium bahasa. Dan bagaimana bahasa sebagai instrumen komunikasi.

PESAN SEBAGAI INFORMASI NASIONALISME

Salah satu unsur media adalah pesan, yang mana pesan dapat memberikan berbagai manfaat dan pengaruh negatif kepada masyarakat. Menurut McLuhan[11], media memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadikan ketegangan diri kita, dan bahkan di antara umat manusia. Sebagai contoh tahun 2012 ini berbagai ketegangan di media cetak telah diekpos baik skandal korupsi yang melibatkan ekskutif dan yudikatif, bahkan persoalan "demo mogok" buruh tentang UU yang memperbolehkan outsourching, konflik antar dan inter pemeluk agama sebagaimana kasus bentrok dua kelompok dengan judul berita "Bentrok di Ambon, Tujuh Kios Dibakar"[12] , dan tawuran antar sekolah di Jakarta. Dalam beberapa pemberitaan tersebut akan berpengaruh pada persepsi masyarakat yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan serta menjadi ancaman keutuhan sendi-sendi masyarakat yang dibangun melalui identitas nasional dan bahasa nasional.

Berangkat dari gagasan identitas, identitas merupakan upaya individu mendifinisikan karakteristik dirinya[13]. Terkait dengan gagasan identitas nasional setidaknya dapat dijelaskan oleh media massa, bagaimana sesungguhnya media massa sebagai teknologi baru dapat memperkuat dan merekatkan berbagai elemen bangsa yang dapat dibayangkan melalui pesan-pesan bahasa nasional, sebagaimana menurut McLuhan[14] bahwa pesan adalah sarana yang membentuk dan mengendalikan jarak dan bentuk-bentuk asosiasi dan tindakan di dalam masyarakat. Namun kenyataannya, dewasa ini teknologi media melalui pesan/ berita dan penayangannya sangat paradoks dengan fungsi yang sesungguhnya, yaitu melakukan kontrol dan kritik konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI.

Ilustrasi di atas untuk menjelaskan sejauhmana media massa bekerja dan membuat pesan atau berita, yang kemungkinan memunculkan banyak ketegangan-ketegangan atau seolah-olah masyarakat kehilangan perekat nasionalisme. Istilah "seolah-olah" dalam frame "*imagined communities*" boleh jadi tidak sesungguhnya atau memang demikian realitasnya. Atau dengan kata lain, bagaimana realitas sosial direpresentasikannya baik dalam representasi hegemoni atau pluralistik? setidaknya pertanyaan tersebut menggambarkan kondisi real wilayah Indonesia dengan kekayaan etnis, bahasa dan budaya, agama dan berbagai kecenderungan lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak

menafikannya berbagai kepentingan dan orientasi hidup untuk eksis dalam bingkai "Nasionalisme". Oleh karenanya, representasi pluralistik akan menjadi diskursus utama yang disosialisasikan oleh berbagai media massa.

PESAN MEDIA : BAHASA DAN KEKUASAAN

Surat kabar merupakan salah satu media massa yang memiliki kekuatan dalam merubah persepsi dan pengetahuan masyarakat luas. Salah satu aspek penting terkait dengan corak pers, adalah pers populer (ngepop). Biasanya tren/kecenderungan yang terjadi persoalan "konsumerisme", "kevulgaran[15], bentuk kecenderungan lain yang mengarah pada komoditas. Media lainnya, melalui kata, suara dan gambar berhasil memproduksi kemiripan dengan dunia nyata. Melalui proses mediasi[16], media merepresentasikan dunia kepada khalayak, dengan mengkonstruksi representasi dunia nyata, dapat dikonstruksi pemaknaan atas realitas yang ada.

Pers populer merupakan pers lebih bersifat personal, yang mana penjelasan terhadap isu-isu publik sangat menukik dan personal, ada yang dipentingkan dalam penjelasannya, yaitu seperangkat totalitas dan imidiasi (kelangsungan), sebagaimana ketika menjelaskan kasus atau isu-isu yang diangkat kerangka penjelas di dalamnya tatanan sosial dihadirkan secara gambalang, sebagaimana diungkapkan oleh Fiske[17], pers popular ditempatkan sebagai juru bicara bagi kesenangan dan ketidakpuasan dalam batas-batas struktur masyarakat yang ada. Bagaimana sesungguhnya kesenangan dan ketidakpuasan dikonstruksi dalam bahasa popular/ngepop, paling tidak pemahaman bahasa tersebut akan mengantarkan kepada suatu penilaian yang tidak lepas dari berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Jika penulis mengambil contoh kasus terorisme yang pada tahun 2012 ini muncul kembali, hampir semua media massa mengkaitkan dengan keamanan dan gagasan nasionalisme, sejauhmana penanaman ideologi Pancasila yang selama ini ditanamkan di berbagai tingkat sekolah dan Perguruan Tinggi. Salah satu kota yang terkenal, secara geopolistis bahwa kota Surakarta seolah-olah dikonstruksi sebagai kota sarang jaringan teroris yang berkembang baik sekala regional maupun nasional, dan ditengarai memiliki jaringan internasional, salah satu survey Kompas.com dengan judul "Lindungi Anak-anak Muda dari Terorisme" dengan prosentase terbesar adalah lemahnya penegakan hukum (28,0%), rendahnya pendidikan dan lapangan kerja (25,2%), lemahnya pemahaman ideologi Pancasila (14,6%), dan Kurangnya dialog antar umat beragama (13,9%).[18] Jika dilihat konstelasi tersebut sesungguhnya mengilustrasikan secara struktur sosial merupakan kombinasi berbagai kelemahan dalam komponen bangsa ini, Indonesia sebagai negara berkembang dan tengah mengalami transisional kenegaraan tentunya menjadi bagian terpenting dan strategi berbagai ideologi secara sporadis berkembang, walaupun upaya mempertahankan ideologi negara NKRI menjadi suatu keharusan dan tidak bisa ditawar lagi.

Isu terorisme di media massa sangat bombastis, seolah-olah gerakan mereka besar dan masih eksis. Dalam konteks ini, konstruksi media massa sangat potensial dalam memproduksi wacana. Oleh karena itu, persoalan penggunaan bahasa sangat penting diperhatikan dalam memproduksi gagasan dalam bentuk diskursus, terutama bagaimana identitas nasional sebagai diskursus utama media massa. Dalam konteks pesan media massa, bahasa dapat dipahami sebagai bentuk praktik sosial. Pertanyaannya mengapa demikian? Menurut Fairclough[19], ada tiga hal:

Pertama, bahasa adalah bagian dari sebuah komunitas sosial. Hubungan yang ada antara keduanya, terletak pada internal dan dialektikal. Bahasa merupakan bagian dari masyarakat, karena fenomena linguistik adalah fenomena sosial spisifik. Fenomena lunguistik tergantung pada kondisi sosial dan efek sosialnya, karena aktifitas bahasa tidak hanya merupakan refleksi ataupun ekspresi tetapi terjadi pada konteks yang ada, seperti halnya kata "terorisme" dalam konteks identitas nasional, dalam konteks politik menjadi bagian gerakan yang harus dilawan dan dimusnahkan.

Kedua, bahasa sebagai praktik sosial. Bahasa merupakan proses sosial, yang mana. Ia membedakan diskursus dan teks. Teks dipahami sebagai satu produk dari pada suatu proses. Sedangkan diskursus dipahami sebagai keseluruhan proses interaksi sosial di mana sebuah teks hanya merupakan bagian didalamnya, proses ini termasuk proses produksi, proses interpretasi di mana teks merupakan suatu sumber.

Ketiga, bahasa merupakan proses sosial yang terkondisi, terkondisi oleh bagian dari masyarakat di luar masalah kebahasaan. Ketika memahami bahasa sebagai dis kursus dan praktik sosial, maka gagasan tidak hanya untuk menganalisis teks, tetapi juga menganalisis hubungan antar teks, proses dan kondisi sosialnya, baik institusi maupun struktur sosialnya. Suatu hal yang penting dalam proses sosial, adalah tidak ada proses produksi dan interpretasi yang mengabaikan latar belakang sosial dan merupakan praktik sosial, atau dibentuk oleh faktor eksternal.

Berangkat dari konteks bahasa baik bentuk tulisan atau ujaran, setidaknya dapat dikembangkan lebih jauh terkait dengan kekuasaan dalam bahasa sendiri. Dalam konteks teori media, yang sering terjadi benturan adalah persoalan liberalisme dan komunitarianisme. Menurut Habermas[20] diskursus merupakan mediasi kritis atas liberalisme dan komunitarianisme. Sebagaimana Posisi teori diskursus jika diterapkan dalam proses sejarah Indonesia yang mencari model untuk dapat menengahi individualisme Barat dan semangat kolektivesme Asia. Rancangan Soepomo tentang konsep negara integralistik, paham "negara kekeluargaan ala Orde Baru, dan rancangan Negara Islam yang menjadi aspirasi masyarakat agama memiliki warna komunitarian yang sangat mencolok, tetapi sementara yang terjadi adalah pengikisan aspek solidaritas sosial, dan lebih memelihara individualisme.

Mendiskusikan persoalan Liberalisme dan Komunitarianisme tidak lepas dari persoalan integrasi dan legitimasi politis. Jika kita mengangkat tema identitas Nasional maka yang menjadi elemen utama diskursus adalah persoalan integrasi dan legitimasi politis. Yang harus diperhatikan dalam teori diskursus Habermas[21], persoalan bentuk negara tidak menjadi perhatian utama, tetapi adanya kritik imanen yang terus dilontarkan.

DISKURSUS: PRAKTIK SOSIAL DAN PLURALITAS

Kebebasan berpendapat atau berbicara di ruang publik atau *public space* dapat dilakukan oleh setiap individu sebagai salah satu wujud artikulasi demokrasi. Mitos kebebasan tersebut mengilustrasikan batasan-batasan yang berlebihan terhadap akses kekuasaan tulisan dan lisan. Bentuk tulisan atau lisan dapat ditafsirkan sebagai bentuk praktik sosial, misalnya relasi umat dengan ulamanya, dalam hal ini subyek yang paling berkuasa adalah Ulama. Kekuasaan atau ulama ini diperoleh melalui instrumen kekuasaan hukum, berupa hukum-hukum agama disebut harta budaya (*cultural goods*)[22], yang sering dikaitkan dengan nilai atau keyakinan.

Prinsip demokrasi Indonesia, bahwa hukum dilegitimasikan tidak hanya melalui alasan-alasan moral, melainkan mempertimbangkan juga argumentasi pragmatis dan politik-etis[23] atau fatsun politis yang dibangunnya. Oleh karena itu, dalam memahami legitimasinya, Hubermas menawarkan modal pluralistis tentang diskursus praktis yang dipraktikkan dalam politik. Untuk menjelaskan bagaimana prosedurnya, Hardiman[24] memberi contoh penerapannya, misal upaya orang untuk memperluas jaringan subsidi BBM. Apa yang dicari dalam hal ini? Untuk mewujudkan proyek tersebut adalah konstruksi-konstruksi, prognosis, teknologi, strategi, pendanaan dan lain-lain. Untuk memecahkan masalah pragmatis tersebut adalah dibutuhkan pengetahuan profesional tentang pragmatis. Kontribusi atau saran dalam diskursus pragmatis mengacu pada pelaksanaan program. Apa yang melegitimasi instruksi dan kebijakan, yaitu pengetahuan profesional yang sahih dan empiris. Diskursus pragmatis bertolak dari kenyataan bahwa tujuan-tujuan kolektif yang hendak diwujudkan sudah ditetapkan. Oleh karena itu, legitimasi pragmatis dapat dicapai dalam kerangka tujuan-tujuan yang sudah diterima dan tinggal memilih sarana untuk mewujudkan tersebut di lapangan. Ada tiga hal yang paling penting, yaitu obyek diskursus etis-politis, diskursus moral dan kompromi-kompromi.

Dunia politik demokrasi terdapat diskursus etis-politis, yang mendasarkan pada keinginan komunitas politis melalui praktik diskursif. Prosesnya anggota komunitas politis tersebut menentukan tujuan-tujuan kolektif dalam rapat konsultasi diskursif secara fair, biasanya dalam proses tersebut muncul tentang gambaran atau orientasi nilai tentang hidup yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Hardiman[25] bahwa kebijakan keluarga berencana tidak hanya berkaitan dengan teknik penekanan/pengurangan demografi, tetapi juga dengan sikap-sikap nomatif yang tepat kepada manusia dan dengan nilai-nilai kultural masyarakat target kebijakan Dengan demikian, tipe diskursus etis-politis ini merupakan proses pemberian argumen-argumen rasional bagi penentuan bersama tujuan-tujuan kolektif atau yang disebut oleh Hegel sebagai tatanan sosial-moral.

Selain diskursus politis di atas, diskursus moral dapat dilegitimasi sebagai tujuan kolektif, jika norma yang diusulkan itu dapat lulus dari pengujian Universalisasi. Misalnya kebijakan pelarangan aliran keagamaan tertentu, misalnya dapat disepakati oleh komunitas mayoritas agama, tetapi hasil konsensus tersebut harus diuji dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diskursus-diskursus tentang pencapaian konsesus secara realistik hampir tidak dapat diwujudkannya. Selanjutnya, jika konsensus tidak dapat diwujudkan maka yang terjadi adalah melakukan kompromi-kompromi dengan cara mentoleransi argumentasi dan keyakinan etis- politis dan menemukan keseimbangan.

Praktik diskursus etis-politis dalam konteks NKRI ini lah, merupakan wujud kompromi-kompromi etis-politis untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya banyak argumentasi untuk mencapai keseimbangan negara dengan dasar negara Pancasila.

KESIMPULAN

Media digunakan untuk mengembangkan berbagai issue bagaimana pengetahuan dan informasi disebarkan dalam kehidupan masyarakat. Penyeberan tersebut ditopang dengan perkembangan teknologi media massa yang menjadi aspek penting dari modernitas. Namun demikian, dalam perspektif yang berbeda teori media dapat

diasumsikan teknologi menjadi kekuasaan dan kekuatan utama yang positif bagi perubahan sosial.

Media merepresentasikan dunia kepada khalayak, dengan mengkonstruksi representasi dunia nyata, dapat dikonstruksi pemaknaan atas realitas yang ada. Terkait dengan gagasan identitas nasional setidaknya dapat dijelaskan oleh media massa, bagaimana sesungguhnya media massa sebagai teknologi baru dapat memperkuat dan merekatkan berbagai elemen bangsa yang dapat dibayangkan melalui pesan-pesan bahasa nasional dan memperkuat Nasionalisme. Keduanya menjadi elemen utama diskursus dalam memproduksi terwujudnya integrasi dan legitimasi politis.

Praktik diskursus etis-politis dalam konteks NKRI merupakan wujud kompromi-kompromi etis-politis untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya banyak argumentasi untuk mencapai keseimbangan negara dengan dasar negara Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bisa ditawar kembali.

ENDNOTE

[1] Laughey, Dan., *Key Themes in Media Theory* (England: open University Press, 2007) , hlm 30.
[2] McGuigan, J., *Modernity and Posmodern Culture* (Meidenhead: Open University Press, 2006).
[3] Tuner, B.S., Periodezation and Politics in the Posmodern, di dalam Laughey Dan., *Key Themes*…., hlm. 30.
[4] Berman, M. *All that is Solid Melt into Air: The Experience of Modernity* (Harmondwort: Penguin, 1988), hlm. 19.
[5] Innis, H.A., *Empire and Communication* (Victoria: PressPorcepic, 1986), hlm. 5.
[6] Innis, H.A.
[7] Innis, H.A., hlm. 34.
[8] Hong Kong Trade Union Education Centre
and Asia Monitor Resource Centre China's Independent
I,abatrr Movement June 1989 . Includes the
Provisional Memorandum of the Autonous Workers'
Union (available from Asia Monitor, 444
Nathan Road, 8-8, Kowloon, Hong Kong . Fax :
3-855319, E -mail: GEONET-GEO2:AMRC)
[9] Anderson, B. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and spread of Nationalism* (London: Verso, 1991), hlm. 46.
[10] Wolton, Dominique., Une Theorie Critique DesNouveaux Medias., alih bahasa Ninik Rochani Sjams. *Kritik atas Teori Komunikasi: Kajian dari Media Konvensional Hingga Era Internet* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 88-89.
[11] McLuhan, M. (1964), Understanding Media: The Extention of Man, di dalam Laughey, Dan., *Key Themes in Media Theory* (England: open University Press, 2007) , hlm. 33.
[12] http://regional.kompas.com/read/2012/10/06/0638254/Bentrok.di Ambon.Tujuh.Kios.
[13] Anderson sandra et al, *Dictionary Media Studies* (London: A&C Blac publicers, 2006), hlm. 114.
[14] McLuhan, didalm Laughey, Dan., *Key Themes…,* hlm. 9.
[15] Gripsrud J.,The aesthethics and Politics Of Melodrama, dalam M.Mander. Communication in Transition, dalam.John Storey, Cultural Studies and The Study od Popular Culture: Theories and Methods, alih bahasa Laily Rahmati. *Pengantar Komprehensif Teori dan Metode Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 93.
[16] Sardar, Ziauddin., *Membongkar Kuasa Media* (Magelang: Langit Aksara, 2008), hlm. 73.

[17] Fiske, J., (1989). Understanding Popular Culture, di dalam John Storey, *Cultural Studies and The Study od Popular Culture: Theories and Methods*, alih bahasa Laily Rahmati. Pengantar Komprehe…, hlm. 95.

[18] Kompas.Com, tgl 25 september 2012 .

[19] Fairclough, N., Language And Power. Alih bahasa Indah Rohmani, *Language And Power; relasi bahasa, kekuasaan dan ideologi* (Gresik: Boyan Publishing, 2003), hlm.25-28.

[20] Hardiman Budi, F., *Demokrasi Leberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Jogjakarta: Kanisius, 2009), hlm. 174.

[21] Hardiman Budi , F., Demokrasi…., hlm.187.

[22] Farclough, N., Language…hlm. 72.

[23] Hardiman Budi, F., Demokrasi….hlm. 113.

[24] Hardiman Budi, F., *Demokrasi*…hlm. 115-117.

[25] *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Sandra, Anderson. 2006. *Dictionary Media Studies.* London: A&C Blac publicers.

Anderson, B. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and spread of Nationalism.* London: Verso.

Berman, M. 1988. *All that is Solid Melt into Air: The Experience of Modernity.* Harmondwort: Penguin.

Fairclough, N. 2003. Language And Power. Alih bahasa Indah Rohmani, *Language And Power; relasi bahasa, kekuasaan dan ideologi.* Gresik: Boyan Publishing.

Fiske, J. 1989. Understanding Popular Culture, di dalam John Storey, *Cultural Studies and The Study od Popular Culture: Theories and Methods.*

Gripsrud J. 2007. The aesthethics and Politics Of Melodrama, dalam M.Mander. Communication in Transition, dalam.John Storey, Cultural Studies and The Study od Popular Culture: Theories and Methods, alih bahasa Laily Rahmati. *Pengantar Komprehensif Teori dan Metode Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop.* Yogyakarta: Jalasutra.

Hardiman Budi, F. 2009. *Demokrasi Leberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas.* Jogjakarta: Kanisius.

Hong Kong Trade Union Education Centre and Asia Monitor Resource Centre China's Independent I,abatrr Movement June 1989 . Includes the Provisional Memorandum of the Autonous Workers' Union (available from Asia Monitor, 444 Nathan Road, 8-8, Kowloon, Hong Kong . Fax :3-855319, E -mail: GEONET-GEO2:AMRC)

http://regional.kompas.com/read/2012/10/06/0638254/Bentrok.di Ambon.Tujuh.Kios.

Innis, H.A. 1986. *Empire and Communication.* Victoria: PressPorcepic.

Kompas.Com, tgl 25 september 2012 .

Laughey, Dan. 2007. *Key Themes in Media Theory.* England: open University Press.

McGuigan, J. 2006. *Modernity and Posmodern Culture.* Meidenhead: Open University Press.

McLuhan, M. 1964, Understanding Media: The Extention of Man, di dalam Laughey, Dan. 2007. *Key Themes in Media Theory.* England: open University Press.

Sardar, Ziauddin. 2008. *Membongkar Kuasa Media.* Magelang: Langit Aksara.

Wolton, Dominique., Une Theorie Critique DesNouveaux Medias. 2007. alih bahasa Ninik Rochani Sjams. *Kritik atas Teori Komunikasi: Kajian dari Media Konvensional Hingga Era Internet.* Yogyakarta: Kreasi Wacana.